

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu wujudkan masyarakat adil dan makmur kita perlu melaksanakan pembangunan nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual yang mencakup di segala bidang yaitu bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya serta pertahanan keamanan yang pelaksanaannya membutuhkan dana atau biaya yang tidak sedikit. Pembiayaan pembangunan nasional ini telah di anggarkan dalam APBN (Salawati, 2008).

Struktur APBN di Indonesia, terdapat penerimaan negara dan pengeluaran negara. Penerimaan negara atau pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Penerimaan perpajakan meliputi pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional yang hingga saat ini merupakan sumber utama kapasitas fiskal pemerintah (Nota Keuangan APBN). Selain itu, kebijakan perpajakan juga berperan penting dalam pengelolaan ekonomi nasional. Berbagai upaya dan strategi telah dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan

pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah (Yulianawati, 2011). Pendapatan pajak dalam negeri berupa pendapatan pajak penghasilan (PPh), pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.

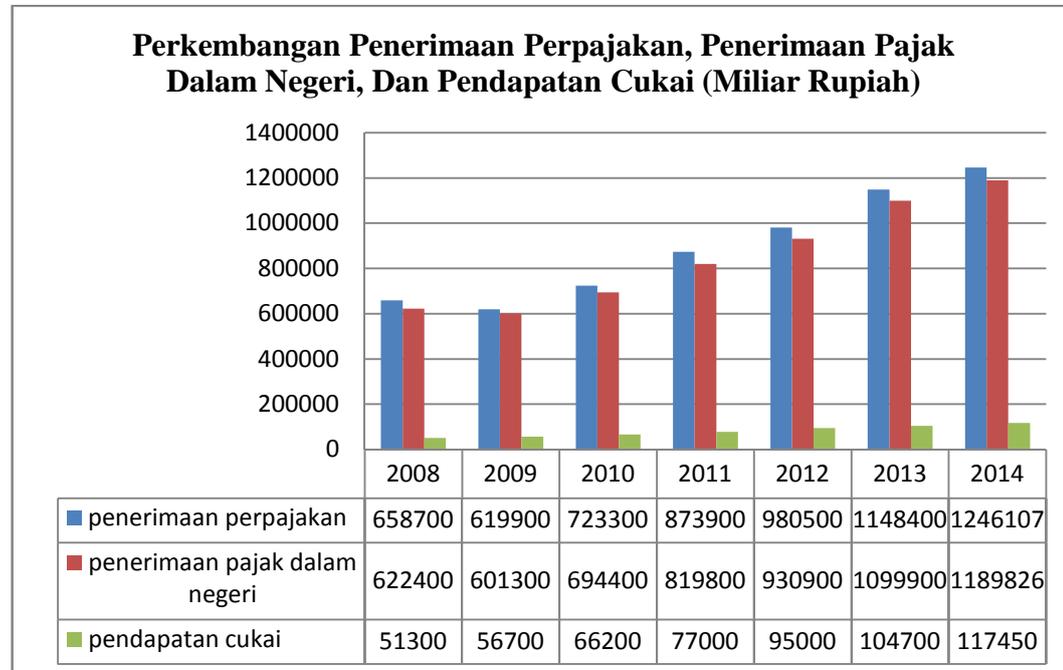
Salah satu pajak dalam negeri yang mempunyai sumbangan yang cukup besar terhadap penerimaan negara adalah cukai. Pendapatan cukai sebagai penyumbang terbesar ketiga dengan kontribusi rata-rata 9,4 persen, tumbuh rata-rata 16,7 persen per tahun. Cukai merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang memiliki karakteristik berbeda, khusus, yang tidak dimiliki oleh jenis pajak lainnya, bahkan tidak serupa dengan jenis pajak yang sama-sama masuk kategori pajak tidak langsung (Subiyantoro, 2004).

Ketentuan yang mengatur pemungutan cukai adalah UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, cukai mempunyai kontribusi yang sangat penting dalam APBN khususnya dalam kelompok penerimaan dalam negeri. Penerimaan cukai dipungut dari tiga jenis barang yaitu etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau (Wibowo, 2003).

Cukai adalah pungutan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati atau menggunakan objek cukai. Secara sederhana dapat dipahami bahwa harga sebungkus rokok yang dibeli oleh konsumen sudah mencakup besaran cukai didalamnya. Pabrik rokok telah menalangi konsumen dalam membayar cukai kepada pemerintah pada saat membeli pita cukai yang terdapat pada kemasan rokok tersebut. Untuk mengembalikan besaran cukai yang sudah dibayarkan oleh pabrik maka pihak pabrik rokok menambahkan besaran cukai tersebut sebagai salah satu komponen dari harga jual rokok tersebut. Dengan cukai, pemerintah berharap dapat menghalangi penggunaan objek cukai untuk digunakan secara bebas. Hal ini berarti dengan adanya kontrol dan pengawasan terhadap banyaknya objek cukai yang beredar dan dikonsumsi (Suryarini dan Tarmudji, 2012).

Cukai merupakan salah satu komponen pajak yang memiliki ciri khusus dan berbeda dengan pungutan pajak lainnya yang dilakukan oleh negara. Ciri khusus tersebut adalah adanya sifat atau karakteristik tertentu pada obyek yang dikenakan cukai dengan tujuan untuk membatasi peredaran komoditi tertentu dimasyarakat (Surono, 2007). Dari tujuan dan peranannya terhadap penerimaan negara, cukai merupakan salah satu jenis penerimaan negara yang mendapat perhatian dari masyarakat luas. Dalam hal kaitannya dengan penerimaan negara, pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pemungutan cukai. Dalam penerimaan, cukai dapat memberikan sumbangan yang cukup besar karena cukai memiliki keunggulan karakteristik dasar, yaitu adanya administrasi yang relatif mudah namun terdapat beberapa kebijakan atau regulasi untuk membatasi

penggunaan dari suatu barang yang kena cukai, serta sistem pengawasan yang efektif (Mangkoesoebroto, 2001).



sumber:Nota keuangan RAPBN 2014 dan 2015

Gambar 1. Perkembangan Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Pajak Dalam Negeri, dan Pendapatan Cukai (Dalam Miliar Rupiah)

Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui bahwa penerimaan perpajakan, penerimaan pajak dalam negeri, dan pendapatan cukai terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam periode 2008-2012, realisasi penerimaan perpajakan mengalami peningkatan secara signifikan, dari Rp 658.700 miliar (2008) menjadi Rp 980.500 miliar (2012) dan Rp 1.246.107 miliar (2014) (Nota keuangan APBN). Sejalan dengan makin meningkatnya penerimaan perpajakan, kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara juga meningkat, dari 67,3 persen (2008) menjadi 73,6 persen (2012). Penerimaan pajak dalam negeri juga terus mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp 622.400 miliar (2008),

mengalami penurunan pada tahun 2009 yaitu penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp601.300 miliar (2009), Rp694.400 miliar (2010), Rp819.800 miliar (2011), Rp930.900 miliar (2012), Rp1.099.900 miliar (2013), dan Rp1.189.826 miliar (2014).

Pemerintah dapat meningkatkan penerimaan cukai, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dengan cara memperluas basis cukai dan menaikkan tarifnya. Pada periode 2008—2012, pendapatan cukai mengalami pertumbuhan rata-rata 16,7 persen per tahun, dari Rp51.300 miliar (2008) menjadi Rp95.000 miliar (2012). Peningkatan pendapatan cukai dalam periode 2008-2012 terutama dipengaruhi oleh peningkatan produksi rokok dan harga jual eceran rokok, kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau setiap tahun, serta keberhasilan dari upaya *extra effort* dalam pemberantasan cukai rokok ilegal. Nota keuangan RAPBN 2014, pendapatan cukai ditargetkan mencapai sebesar Rp114.300 miliar, terdiri atas pendapatan cukai hasil tembakau sebesar Rp108.700 miliar dan pendapatan cukai MMEA dan EA masing-masing sebesar Rp5.400 miliar dan Rp200 miliar. Apabila dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP 2013, pendapatan cukai secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar Rp9.600 miliar atau 9,1 persen. Apabila dilihat dari kontribusinya, pendapatan cukai didominasi oleh pendapatan cukai hasil tembakau yang memberikan kontribusi rata-rata 96,2 persen. Sementara itu, kontribusi pendapatan cukai etil alkohol (EA) mencapai 0,4 persen, dan cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) memberikan kontribusi sebesar 3,3 persen.

Cukai di Indonesia, terdapat beberapa jenis barang kena cukai diantaranya, etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Penerimaan pemerintah dari sektor cukai didominasi oleh cukai hasil tembakau.

Tembakau merupakan salah satu komoditas perdagangan penting di Indonesia.

Produk tembakau yang diperdagangkan adalah daun tembakau dan rokok. Rokok adalah komoditas perdagangan penting di dunia termasuk Indonesia dan

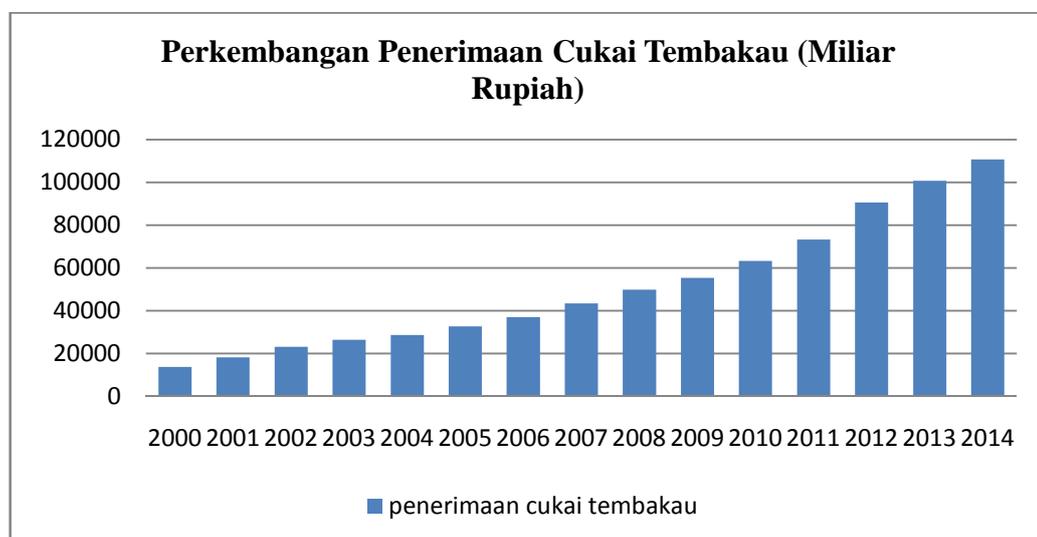
merupakan produk bernilai tinggi, sehingga bagi beberapa negara termasuk

Indonesia berperan dalam perekonomian nasional, yaitu sebagai salah satu sumber

devisa, sumber penerimaan pemerintah dan pajak (cukai), sumber pendapatan

petani dan lapangan kerja masyarakat (usaha tani dan pengolahan rokok)

(Rachmat, 2010).



Sumber: Nota keuangan APBN tahun 2000-2014

Gambar 2. Perkembangan Penerimaan Cukai Tembakau (Miliar Rupiah).

Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa penerimaan cukai dari hasil tembakau

ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penerimaan cukai memang

didominasi oleh cukai hasil tembakau. Dari penerimaan cukai tersebut, 95% berasal dari cukai hasil tembakau yang diperoleh dari jenis hasil tembakau (JHT) berupa rokok sigaret kretek mesin, rokok sigaret tangan, dan rokok sigaret putih mesin yang dihasilkan oleh industri rokok (Wibowo, 2003). Rokok merupakan barang normal, karena semakin tinggi harga barang tersebut maka jumlah permintaannya akan semakin berkurang, akan tetapi pengaruh kenaikan harga terhadap permintaan rokok diperkirakan kecil karena barang tersebut bersifat adiktif (Anggreani, 2013). Masyarakat mengkonsumsi rokok adalah untuk mengikuti perkembangan gaya hidup dan pengaruh lingkungan. Rokok yang dikonsumsi masyarakat cukup bervariasi dari berbagai merek. Dilihat dari proses pembuatannya, rokok memiliki jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin (SKM), dan Sigaret Putih Mesin. Sigaret Kretek Tangan adalah rokok yang isinya adalah bahan baku tembakau dan cengkeh tanpa filter. Sigaret Kretek Mesin (SKM) sendiri memiliki 2 kategori yaitu Sigaret Kretek Mesin Full Flavor (SKM FF), yaitu rokok kretek mesin yang dalam proses pembuatannya ditambahkan aroma rasa yang khas dan yang kedua adalah Sigaret Kretek Mesin Low Tar Low Nikotin (SKM LTLN), yaitu rokok kretek mesin yang menggunakan kandungan tar dan nikotin rendah, serta jarang menggunakan aroma yang khas. SPM (Sigaret Putih Mesin) adalah rokok yang bahan baku atau isinya hanya daun tembakau yang diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu yang proses pembuatannya menggunakan mesin (Cornelius, 2003).

Peningkatan penerimaan cukai tembakau yang cukup tinggi setiap tahunnya dan memberikan kontribusi yang besar pada penerimaan negara membuat pemerintah

berupaya untuk terus meningkatkan penerimaan pajak cukai dari sektor tembakau ini. Rokok memiliki keuntungan ekonomi yang sangat besar namun juga memiliki kerugian. Kerugian rokok ada pada faktor kesehatan. Orang yang mengkonsumsi rokok lebih beresiko terkena kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin daripada yang tidak mengkonsumsi. Kerugian itu tidak hanya dialami oleh perokok (perokok aktif) namun juga dialami orang-orang disekitar perokok (perokok pasif). Bahkan dampak negatif perokok pasif lebih besar dari perokok aktif. Rokok juga dapat menimbulkan kecanduan akibat dari kandungan nikotin di dalamnya (Buana,2013). Adanya bahaya ini, pemerintah melakukan pembatasan untuk konsumsi tembakau. Pemerintah melakukan kebijakan atau regulasi untuk membatasi penggunaan dari suatu barang yang kena cukai, serta sistem pengawasan yang efektif. Kebijakan yang dilakukan ini adalah dengan melakukan pembaharuan kebijakan melalui peraturan perundang-undangan untuk membatasi jumlah konsumsi tembakau. Menaikkan tarif cukai dengan merubah Undang-undang, dari Undang-undang No.11 tahun 1995 yang diubah menjadi Undang-undang No.39 tahun 2007. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah konsumsi tembakau. Padahal penerimaan negara yang berasal dari cukai hasil tembakau memberikan sumbangan cukup besar pada penerimaan APBN. Hal ini membuat pemerintah harus lebih selektif dalam mengambil kebijakan tentang cukai hasil tembakau. Satu sisi, pemerintah harus berupaya meningkatkan sumber-sumber penerimaan, sedangkan disisi lain pemerintah harus membatasi konsumsi tembakau karena tembakau memiliki dampak yang buruk terhadap kesehatan masyarakat.

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai tembakau di Indonesia. Menurut Isdijoso (2004) faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai tembakau di Indonesia diantaranya GDP, nilai tukar, konsumsi tembakau dan *dummy krisis*. Hubungan PDB dengan kesejahteraan dapat dijelaskan sebagai berikut, PDB dapat mengukur total pendapatan maupun total pengeluaran perekonomian untuk barang dan jasa. Jadi, PDB per orang (kapita) menjelaskan pendapatan dan pengeluaran dari rata – rata seseorang dalam perekonomian. Karena kebanyakan orang lebih memilih pendapatan dan pengeluaran yang lebih tinggi, PDB per orang (kapita) merupakan ukuran kesejahteraan rata – rata perorangan yang cukup alamiah (Mankiw,2006). Kemudian menurut Dinan Arya Putra (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor tembakau ke Jerman adalah volume ekspor tembakau, luas lahan tembakau, produksi tembakau, harga tembakau dunia, dan PDB Jerman. Tembakau merupakan salah satu komoditi ekspor pertanian yang ikut serta dalam salah satu penyumbang PDB di sektor pertanian (Putra,2013). Serta Surono (2007) menambahkan pengaruh kebijakan cukai, fasilitas penundaan, tingkat produksi terhadap pungutan cukai pada industri rokok di Sumatera Utara.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai tembakau di Indonesia adalah PDB per kapita, nilai tukar, dan produksi tembakau. Faktor-faktor ini memberikan pengaruh terhadap jumlah penerimaan cukai tembakau di Indonesia. PDB per kapita akan mencerminkan pendapatan per kapita masyarakat. Pendapatan per kapita masyarakat akan berpengaruh pada daya beli masyarakat untuk

mengonsumsi suatu barang. Pendapatan konsumen akan menentukan besarnya daya beli yang dimilikinya. Sehingga untuk barang normal, peningkatan pendapatan konsumen akan menaikkan permintaan barang tersebut. Sebaliknya untuk barang inferior, peningkatan pendapatan konsumen justru akan menurunkan konsumsinya (Soeharno, 2007). Adapun faktor yang sangat penting dalam menentukan corak permintaan terhadap barang atau jasa adalah pendapatan. Tingkat pendapatan masyarakat akan mencerminkan daya beli masyarakat. Jika pendapatan naik, jumlah barang yang diminta mungkin naik ataupun sebaliknya (Samuelson, 2001). Nilai tukar akan berpengaruh terhadap ekspor tembakau Indonesia. Kenaikan nilai tukar akan menyebabkan peningkatan ekspor. Oleh karena itu kegiatan ekspor berhubungan positif dengan nilai tukar (Iswanto, 2013). Jumlah produksi tembakau juga berpengaruh terhadap besarnya penerimaan cukai tembakau di Indonesia, karena tembakau merupakan objek dari cukai tembakau. Meningkatnya produksi tembakau akan meningkatkan produk hasil olahan tembakau. Dengan meningkatnya jumlah produk hasil olahan tembakau maka pemesanan pita cukai juga akan meningkat dan jumlah penerimaan cukai juga akan mengalami peningkatan.

Penerimaan pemerintah dari sektor cukai tembakau ini cukup besar dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dari sektor cukai. Sehingga perlu diproyeksikan baik jangka pendek maupun jangka panjang tentang kontribusi penerimaan pemerintah dari sektor cukai tembakau ini.

B. Rumusan Masalah

Peningkatan penerimaan cukai tembakau yang cukup tinggi setiap tahunnya dan memberikan kontribusi yang besar pada penerimaan negara membuat pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan penerimaan pajak cukai dari sektor tembakau ini. Namun adanya bahaya kesehatan akibat mengkonsumsi tembakau, maka pemerintah melakukan pembatasan untuk konsumsi tembakau. Pemerintah melakukan kebijakan atau regulasi untuk membatasi penggunaan dari suatu barang yang kena cukai, serta sistem pengawasan yang efektif. Kebijakan yang dilakukan ini adalah dengan melakukan pembaharuan kebijakan melalui peraturan perundang-undangan untuk membatasi jumlah konsumsi tembakau. Hal ini membuat pemerintah harus lebih selektif dalam mengambil kebijakan tentang cukai hasil tembakau. Satu sisi, pemerintah harus berupaya meningkatkan sumber-sumber penerimaan, sedangkan disisi lain pemerintah harus membatasi konsumsi tembakau karena tembakau memiliki dampak yang buruk terhadap kesehatan masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah PDB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan cukai tembakau di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
2. Apakah nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan cukai tembakau di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?

3. Apakah produksi tembakau berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan cukai tembakau di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
4. Apakah PDB per kapita, nilai tukar, dan produksi tembakau secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan cukai tembakau di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang?
5. Bagaimana proyeksi penerimaan cukai tembakau di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Menganalisis pengaruh PDB per kapita terhadap penerimaan cukai tembakau di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
2. Menganalisis pengaruh nilai tukar terhadap penerimaan cukai tembakau di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Menganalisis pengaruh produksi tembakau terhadap penerimaan cukai tembakau di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
4. Menganalisis pengaruh PDB per kapita, nilai tukar, dan produksi tembakau secara bersama-sama terhadap penerimaan cukai tembakau di Indonesia.
5. Memproyeksikan penerimaan cukai tembakau di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai persyaratan penulis mendapatkan gelar sarjana.
2. Memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai tembakau di Indonesia dan bagaimana pengaruhnya terhadap penerimaan cukai tembakau di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Memberikan gambaran tentang proyeksi penerimaan cukai tembakau di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
4. Sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian lebih lanjut.

E. Kerangka Pemikiran

Penerimaan negara atau pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Penerimaan perpajakan meliputi pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional yang hingga saat ini merupakan sumber utama kapasitas fiskal Pemerintah. Selain itu, kebijakan perpajakan juga berperan penting dalam pengelolaan ekonomi nasional. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah (Nila Yulianawati, 2011).

Pendapatan pajak dalam negeri berupa pendapatan pajak penghasilan (PPh), pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Salah satu pajak dalam negeri yang mempunyai sumbangan yang cukup besar terhadap penerimaan negara adalah cukai. Cukai merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang memiliki karakteristik berbeda, khusus, yang tidak dimiliki oleh jenis pajak lainnya, bahkan tidak serupa dengan jenis pajak yang sama-sama masuk kategori pajak tidak langsung (Subiyantoro, 2004).

Di Indonesia, terdapat beberapa jenis barang kena cukai diantaranya, etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Penerimaan pemerintah dari sektor cukai didominasi oleh cukai hasil tembakau. Tembakau merupakan salah satu komoditas perdagangan penting di Indonesia. Produk tembakau yang diperdagangkan adalah daun tembakau dan rokok. Tembakau dan rokok merupakan produk bernilai tinggi. Rokok merupakan barang normal, karena semakin tinggi harga barang tersebut maka jumlah permintaannya akan semakin berkurang, akan tetapi pengaruh kenaikan harga terhadap permintaan rokok diperkirakan kecil artinya elastisitas permintaan karena harga (*price elasticity of demand*) kecil, karena barang tersebut bersifat adiktif (Anggreani, 2013).

Pemerintah melakukan kebijakan atau regulasi untuk membatasi penggunaan dari suatu barang yang kena cukai, serta sistem pengawasan yang efektif. Kebijakan

yang dilakukan ini adalah dengan melakukan pembaharuan kebijakan melalui peraturan perundang-undangan untuk membatasi jumlah konsumsi tembakau. Menaikkan tarif cukai dengan merubah Undang-undang, dari Undang-undang No.11 tahun 1995 yang diubah menjadi Undang-undang No.39 tahun 2007. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah konsumsi tembakau. Padahal penerimaan negara yang berasal dari cukai hasil tembakau memberikan sumbangan cukup besar pada penerimaan APBN. Ini membuat pemerintah harus lebih selektif dalam mengambil kebijakan tentang cukai hasil tembakau ini. Disatu sisi, pemerintah harus berupaya meningkatkan sumber-sumber penerimaan, sedangkan disisi lain pemerintah harus membatasi konsumsi tembakau karena tembakau memiliki dampak yang buruk terhadap kesehatan.

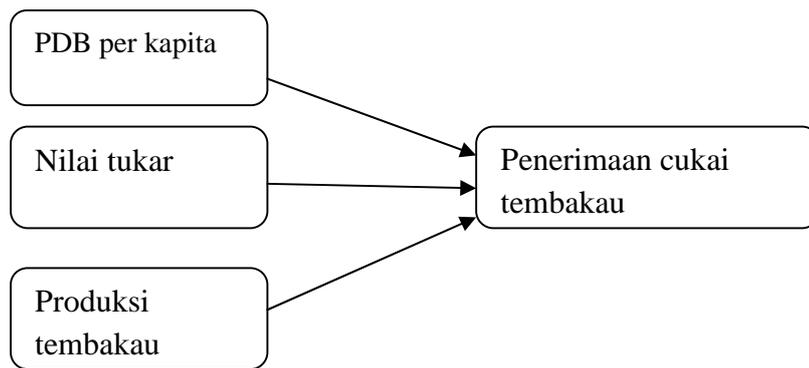
Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai tembakau di indonesia. Menurut Isdijoso (2004) faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai tembakau di indonesia diantaranya GDP, nilai tukar, konsumsi tembakau dan *dummy krisis*. Kemudian menurut Dinan Arya Putra (2013) faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor tembakau ke Jerman adalah volume ekspor tembakau, luas lahan tembakau, produksi tembakau, harga tembakau dunia, dan PDB Jerman. Tembakau merupakan salah satu komoditi ekspor pertanian yang ikut serta dalam salah satu penyumbang PDB di sektor pertanian (Putra,2013). Serta Surono (2007) menambahkan pengaruh kebijakan cukai, fasilitas penundaan, tingkat produksi terhadap pungutan cukai pada industri rokok di Sumatera Utara.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cukai tembakau di Indonesia adalah PDB per kapita, nilai tukar, dan produksi tembakau. Faktor-faktor ini memberikan pengaruh terhadap jumlah penerimaan cukai tembakau di Indonesia. Besarnya PDB per kapita akan mencerminkan pendapatan per kapita masyarakat.

Pendapatan per kapita yang meningkat akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat untuk mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Dengan meningkatnya pendapatan per kapita maka konsumsi masyarakat akan produk tembakau juga akan meningkat, sehingga penerimaan cukai tembakau juga meningkat. Nilai tukar akan berpengaruh terhadap ekspor tembakau. Ketika nilai tukar rupiah terdepresiasi yang artinya nilai tukar rupiah terhadap dollar meningkat maka akan meningkatkan volume ekspor. Ketika ekspor tembakau meningkat maka produksi produk tembakau yang diekspor juga mengalami peningkatan. Produksi produk tembakau yang meningkat akan meningkatkan penerimaan cukai tembakau.

Produksi tembakau akan berpengaruh terhadap jumlah produk olahan tembakau. Ketika jumlah produksi tembakau meningkat, maka produk olahan tembakau juga akan mengalami peningkatan. Produksi olahan tembakau yang meningkat akan meningkatkan pemesanan pita cukai. Sehingga penerimaan cukai tembakau juga meningkat.

Penerimaan pemerintah dari sektor cukai tembakau ini cukup besar dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dari sektor cukai. Sehingga perlu diproyeksikan baik jangka pendek maupun jangka panjang tentang kontribusi penerimaan pemerintah dari sektor cukai tembakau ini.



Gambar 3. Kerangka Pemikiran Analisis Penerimaan Cukai Tembakau di Indonesia

F. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, permasalahan yang ada merujuk pada dugaan sementara yaitu:

1. Diduga PDB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan cukai tembakau di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
2. Diduga nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan cukai tembakau di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Diduga produksi tembakau berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan cukai tembakau di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.
4. Diduga PDB per kapita, nilai tukar, dan produksi tembakau secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan cukai tembakau di Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang.

5. Penerimaan cukai tembakau diproyeksikan akan mengalami peningkatan pada beberapa tahun ke depan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian dari pendahuluan yang berisis mengenai latar belakang yang mendasari pemilihan masalah adalah penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitia, uji hipotesis, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenaivariabel-variabel yang digunakan dalam penelitian , dan definisi operasional, jenis serta sumber data, metode pengumpulan serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai uraian tentang gambaran umum objek penelitian. Bagian pembahasan menerangkan interpretasi dan pembahasan hasil penelitian secara komprehensif.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan di bab IV.